



PEMERINTAH
KOTA
PASURUAN

RENCANA KERJA (RENJA)

Perangkat Daerah Kota
Pasuruan

2025

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Pasuruan



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Pahlawan No. 28 A Telp.(0343) 424919

P A S U R U A N

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN
NOMOR 188/ 045 / 423.116/ 2023**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah No.4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No.4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Walikota Pasuruan No.18 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan;
23. Peraturan Walikota Pasuruan No.15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025.

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:
1. Merencanakan jadwal dan mempersiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
 2. Menghimpun dan menganalisa data dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
 3. Melaksanakan Koordinasi dengan bidang – bidang dan UPT di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan;
 4. Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan RKPD Tahun 2025; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
- KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2025

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Desember 2023

**PLT. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN**



Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KOTA PASURUAN
 NOMOR 188/045 /423.116/2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN KOTA PASURUAN TAHUN
 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN
 TAHUN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
1.	PEMBINA	Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	KOORDINATOR	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.	KETUA I	Kepala Bidang Perdagangan
4.	KETUA II	Kepala Bidang Perindustrian
5.	KETUA III	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
6.	SEKRETARIS	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
7.	ANGGOTA	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Pengawas Perdagangan Ahli Muda 3. Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda 4. Kepala UPTD Pasar 5. Kepala UPT Industri Logam 6. Kepala UPT Kemetrolgian

**PLT. KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KOTA PASURUAN**


Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640917 199003 1 013

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, maka Rencana Kerja Tahun 2025 dapat disusun. Rencana Kerja tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana pada Rencana Kerja Tahun 2025 ini mengusung tema “Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial”.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025, disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2025, dengan penyempurnaan sesuai ‘Titik Nol’ Rencana Kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta dengan maksud sebagai referensi dan acuan Dinas dalam melaksanakan Visi Pemerintah Daerah Kota Pasuruan tahun 2021-2026, yaitu :

“ MENJADIKAN KOTA PASURUAN MAJU, INDAH, DAN HARMONIS”

dalam arti :

“ Maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya “

atau dengan Slogan :

*Pasuruan Kota “ **MADINAH** “*

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) 2025, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya sehingga dapat terselesainya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 22 Juli 2024

**Plt. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN**



HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda

NIP: 19651231 198602 1 041

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.3.1 Isu Perindustrian	34
2.3.2 Isu Perdagangan	34
2.3.3 Isu Pengelolaan Pasar	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	53
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
BAB V PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan perindustrian dan perdagangan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Isi Renja adalah menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada satu tahun ke depan.

Proses penyusunan Renja 2025 OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 merupakan pelaksanaan awal tahun rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Misi Walikota terpilih pada tahun 2021. Selanjutnya dari rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 setiap tahun disusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja. Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, penjelasan mengenai tindak lanjut

dengan proses penyusunan RAPBD, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPP, RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
 19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanguna jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2019 tentang pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 16 Seri E);
 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 -2026;
32. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan;
33. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Mensinergikan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan dan Rencana Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 2021-2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Tersedianya acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.
2. Terwujudnya pedoman untuk evaluasi program/kegiatan selama satu tahun anggaran.
3. Merumuskan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja PD merupakan Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Melalui urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi misi kepala daerah. Tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung misi I yaitu “Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan” dan misi III yaitu “Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata”.

Pada tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tujuan yakni Kontribusi Sektor Unggulan Meningkatkan. Pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator tujuan, yaitu Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 49,05% dan tercapai 49,79%. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki dua sasaran yaitu Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan dan diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Sektor

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Unggulan dengan target 0,1% dan tercapai 0,24%. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan dan diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Omset dengan target 1% dan tercapai 9,91%.

Pencapaian target ini juga didukung oleh program dan kegiatan pada urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Pada penyelenggaraan urusan perdagangan didukung oleh 7 (tujuh) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan. Program pertama adalah Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen terhadap Perlindungan Konsumen. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 70,17% sehingga capaiannya sebesar 87,71%. Adapun yang menjadi penghambat pencapaian target dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada produsen dan konsumen secara intensif.

Program kedua yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 52,20% sehingga capaiannya sebesar 52,20%. Ketidaktercapaian target indikator disebabkan adanya penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar pada tahun 2023 yang cukup signifikan sehingga pedagang pasar merasa keberatan untuk membayar retribusi tersebut. Setelah dilakukan evaluasi maka dilakukan penundaan penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar, namun target PAD yang tertuang sudah menerapkan tarif baru sesuai penyesuaian tarif yang ada sehingga realisasi terhadap target PAD belum dapat tercapai

Program ketiga yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diukur dengan satu indikator yaitu Rata-rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 10% dan terealisasi 9,61% sehingga capaiannya sebesar 103,90%. Capaian ini berdasarkan data hasil monitoring kebutuhan

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

pokok selama tahun 2023. Hal ini didukung oleh data harga dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting yang dilaksanakan setiap harinya dan dilaporkan setiap bulannya.

Program keempat yaitu Program Pengembangan Ekspor diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi 4,54% sehingga capaiannya sebesar 90,80%. Ketidaktercapaian target indikator disebabkan oleh kurangnya *follow-up* dari para pelaku usaha ekspor terhadap para *customers* sehingga setelah melaksanakan kegiatan promosi dagang tidak berdampak yang sangat signifikan, selain itu dari faktor lain juga mempengaruhi ketidaktercapaian target ini adalah produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha cenderung tetap dan tidak mengikuti tren yang berlaku saat ini.

Program kelima yaitu Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diukur dengan satu indikator yaitu persentase UTTP yang telah ditera/tera ulang. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 11% dan terealisasi 16,77% sehingga capaiannya sebesar 152,45%. Ketercapaian target indikator didukung oleh SDM UPT. Kemetrolgian Kota Pasuruan sudah memenuhi beban kerja dalam pelayanan tera/tera ulang dan peralatan standar yang sudah memenuhi ketentuan Unit Metrologi Legal.

Program keenam yaitu Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri diukur dengan satu indikator yaitu persentase IKM yang mengalami peningkatan pemasaran. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 30% dan terealisasi 39,26% sehingga capaiannya sebesar 130,86%. Ketercapaian indikator target didukung oleh antusiasme para pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran dalam kota dan seringnya event yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Pada penyelenggaraan urusan perindustrian didukung oleh 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Peningkatan IKM berkembang. Pada

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tahun 2023, ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi 5% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah IKM yang berkembang pada tahun 2023 mencapai 84 IKM, dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 80 IKM. Ketercapaian target indikator pada tahun ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pelatihan, fasilitasi dan sertifikasi berkelanjutan yang didukung dari anggaran bersumber dari DAK Non-Fisik Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) PD merupakan Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian target antara lain adalah kecukupan anggaran, sedangkan *schedule* harus sesuai dengan SIPD, serta faktor jangka waktu dalam pengadaan barang/jasa, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan, adanya beberapa faktor tersebut

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

menyebabkan kurang maksimalnya target yang telah direncanakan.

Untuk mencapai target tahun yang akan datang dan program/kegiatan bisa terlaksana dengan baik, maka perlu adanya dukungan perencanaan, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup agar program/kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Pasuruan**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	98	91	98	100	102%	98	99	101%
3 30 01 2 01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	98	100	98	100	102%	98	99	101%
3 30 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16		4	4	100%	4	8	50%

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3 30 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16		4	4	100%	4	8	50%
3 30 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1		1	1	100%	1	1	100%
3 30 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	98	100	98	100	102%	98	99	101%
3 30 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65		65	65	100%	68	67	102%
3 30 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16		4	4	100%	4	8	50%

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3 30 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	98	100	98	100	102%	98	99	101%
3 30 01 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	16		4	4	100%	4	8	50%
3 30 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	98	100	98	100	102%	98	99	101%
3 30 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	44		11	15	136%	11	26	59%
3 30 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180		45	12	27%	45	57	32%
3 30 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48		12	6	50%	12	18	38%

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3 30 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48		12	11	92%	12	23	48%
3 30 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90	100	98	100	102%	-	100	111%
3 30 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	44		6	8	133%	-	8	18%
3 30 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	98	100	98	100	102%	98	99	101%
3 30 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	80		20	5	25%	20	25	31%
3 30 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48		12	12	100%	12	24	50%
3 30 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48		12	12	100%	12	24	50%

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)	
3	30	01	2	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</i>	98	100	98	100	102%	98	99	101%
3	30	01	2	09	01	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	56		14	14	100%	14	28	50%
3	30	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	92		23	17	74%	23	40	43%
3	30	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16		4	10	250%	4	14	88%
3	30	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4		1	1	100%	1	2	50%

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3 30 03 2 01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	12		3	3	100%	3	6	50%
3 30 03 2 01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	24		6	6	100%	6	12	50%
3 30 03 2 02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pelaku perdagangan yang dibina	6,4	8,1	13,77	26,8	195%	13,77	20	317%
3 30 03 2 02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	12		3	2	67%	4	6	50%
3 30 03 2 02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	48		12	12	100%	12	24	50%
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok	10	8,26	10	9	110%	10	9,50	105%

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3 30 04 2 02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga pangan yang mengalami fluktuasi harga lebih besar 10%	10	6,37	10	10	100%	10	10	100%
3 30 04 2 02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	48		12	12	100%	12	24	50%
3 30 04 2 02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4		2	2	100%	2	4	100%
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor	5	10	5	4,54	91%	5	4,77	95%

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	30	05	2	01		<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase IKM yang melakukan ekspor</i>	0,4	0,6	0,4	0,67	168%	0,4	0,54	134%
3	30	05	2	01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	800		200	200	100%	-	200	25%
3	30	05	2	01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	140		35	29	83%	35	64	46%
3	30	05	2	01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	12		-	-	-	3	3	25%
3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat UTTP yang telah ditera/tera ulang	11	13,17	11	16,77	152%	11	13,89	126%
3	30	06	2	01		<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang</i>	4		1	1	100%	1	2	50%

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3 30 06 2 01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	4000		1000	2080	208%	1000	3080	77%
3 30 06 2 01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	160		220	1720	782%	40	1760	1100%
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	30	57,25	30	39,26	131%	-	39	131%
3 30 07 2 01	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Persentase IKM yang dipromosikan</i>	4		4	4,77	119%	-	5	119%
3 30 07 2 01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	600		100	163	163%	-	163	27%
3 31	URUSAN PERINDUSTRIAN									
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	5	433,3	5	5,0	100%	5	5	100%

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3 31 2 2 01	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase IKM berkembang</i>	30	30,3	30	45,9	153%	30	38	127%
3 31 2 2 01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	24		6	6	100%	6	12	50%
3 31 2 2 01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	36		0	0	-	9	9	25%
3 31 2 2 01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	20		5	5	100%	2	7	35%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan digunakan beberapa indikator, yakni mengacu pada sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan yang disajikan Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan		Indikator Tujuan	49.00%	49.05%	49.10%	49.15%	49.79%		49.10%	49.15%	
	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan		Indikator Sasaran	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.24%		0.1%	0.1%	
	Persentase Peningkatan Omset		Indikator Sasaran	1%	1%	1%	1%	9.92%		1%	1%	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam pembangunan ekonomi Kota Pasuruan adalah meningkatkan kontribusi PDRB Sektor Unggulan yang terdiri dari kontribusi PDRB kategori perindustrian dan kategori perdagangan. Dua kategori tersebut merupakan kategori yang mendominasi pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan. Pada tahun 2023, kedua kategori tersebut berkontribusi sebesar 49,79%. Artinya bahwa kategori perindustrian dan perdagangan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian di Kota Pasuruan.

Pada tabel T-C.30 dapat dijelaskan bahwa pada indikator sasaran yang capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan

Pada tahun 2023, target indikator untuk Sasaran Pertama sebesar 0,1% dan realisasi sebesar 0,24% sehingga ketercapaian target sebesar 240%. Pencapaian ini berdasarkan data Nilai Produksi Sektor Unggulan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Tingkat keberhasilan yang telah dicapai antara lain: adanya peningkatan jumlah IKM di Kota Pasuruan. Secara umum kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian beserta program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Persentase peningkatan produksi sektor unggulan mencapai 0,24% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,1%. Persentase peningkatan produksi sektor unggulan ini didasarkan pada berkembangnya jumlah IKM di Kota Pasuruan melalui peningkatan skill atau kemampuan SDM, peningkatan kualitas mutu produk, sertifikasi kompetensi dan diversifikasi produk yang dihasilkan setelah mengikuti kegiatan perindustrian berupa pelatihan pengembangan SDM, pendampingan dan sertifikasi produk.

2. Persentase Peningkatan Omset

Pada tahun 2023, target indikator untuk Sasaran Kedua sebesar 1% dan realisasi sebesar 9,91% sehingga ketercapaian target sebesar 991%. Pencapaian ini berdasarkan data Nilai Omset Produk Unggulan tahun 2023 mengalami peningkatan

dari tahun 2022. Tingkat keberhasilan yang telah dicapai secara umum kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan beserta program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukungnya menunjukkan hasil yang positif, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja utama yaitu pada persentase peningkatan omset mencapai peningkatan sebesar 9,91%. Peningkatan omset dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas produk unggulan, peningkatan skill atau kemampuan SDM dalam memasarkan produknya, dan banyaknya memanfaatkan peluang dalam proses pemasaran.. Melalui program/kegiatan tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan telah memfasilitasi para pelaku usaha, khususnya UKM dan UMKM untuk mampu mengikuti berbagai pameran/*event* yang ada. Sehingga keikutsertaan para pelaku usaha inilah yang banyak mempengaruhi peningkatan pemasaran para pelaku usaha.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis pada hakikatnya merupakan masalah yang harus diprioritaskan untuk ditangani oleh pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan urgensi, relevansi penanganan, kedudukan dan kemampuan daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan. Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat dirumuskan isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun dalam kaitannya dengan fokus misi dan agenda, antara lain:

- 1) Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- 2) Harga bahan pokok yang fluktuatif
- 3) Lemahnya sarana prasarana perdagangan

Penjelasan isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Isu Perindustrian

- 1) Kurangnya sarana prasarana untuk kebutuhan industri logam, seperti mesin dan sarana promosi produk logam;
- 2) Ketersediaan tenaga terampil yang masih kurang untuk industri kecil menengah (IKM) komoditi kerajinan (regenerasi yang minim);
- 3) Keterbatasan anggaran/biaya untuk kepengurusan legalitas bahan baku kayu bagi IKM mebel berupa pelayanan dan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK);
- 4) Pengembangan usaha yang terkendala modal bagi IKM makanan dan minuman;
- 5) Industri kreatif yang terkendala pengembangan produk berupa media promosi yang masih kurang; dan
- 6) Dalam rangka melindungi produk dalam negeri agar dapat meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi kebutuhan dan menguasai pasar nasional, maka adanya fasilitasi sertifikasi TKDN membantu industri dalam negeri memperoleh prioritas dalam belanja barang dan jasa pemerintah.

2.3.2 Isu Perdagangan

- 1) Adanya masa transisi dari pandemi menuju endemi yang menyebabkan pelaku usaha berusaha untuk meningkatkan penjualannya;
- 2) Kurangnya pengusaha yang memahami regulasi tentang cara ekspor yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha dan perkembangan perusahaan dalam mempromosikan produk ekspor;
- 3) Belum maksimalnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika;

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- 4) Pengembangan/Revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa (pengembangan pasar);
- 5) Belum adanya regulasi tentang perusahaan berkategori ekspor-import untuk melaporkan datanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 6) Masih banyaknya pengusaha UKM yang belum memanfaatkan potensi pemasaran antar daerah/antar pulau melalui fasilitas pasar lelang komoditi, hal ini sangat berpengaruh pada sistem promosi dan distribusi lokal Kota Pasuruan;
- 7) Menjaga inflasi sesuai target pemerintah dengan melaksanakan kegiatan pemantauan harga dan pelaporan stok barang kebutuhan pokok dengan penetrasi pasar melalui operasi pasar murah dan rapat koordinasi untuk menjaga dan menghimpun ketersediaan barang kebutuhan pokok serta memastikan ketersediaan barang saat hari besar;
- 8) Dalam rangka meningkatkan penyerapan produk dalam negeri, maka dilakukan dengan peningkatan daya saing dan optimalisasi kapasitas produk dengan bantuan sarana prasarana, promosi/ kampanye penggunaan produk dalam negeri melalui media social dan sosialisasi kepada generasi muda, dan upaya terakhir adalah peningkatan akses pemasaran dengan mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan pelaku usaha besar.
- 9) Kurang adanya kesadaran dari para pedagang pasar atau diluar lingkungan pasar terhadap peneraan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan perlengkapannya, sehingga untuk menciptakan pasar tertib ukur masih jauh dari harapan dan banyak konsumen yang dirugikan; dan
- 10) Kurangnya keinginan untuk memanfaatkan fasilitas pendaftaran online pelayanan tera-tera ulang oleh pemilik alat-alat UTTP terutama di tingkat perusahaan.

2.3.3 Isu Pengelolaan Pasar

- 1) Data PKL di Kota Pasuruan sudah lama sehingga perlu adanya pendataan ulang terhadap PKL;
- 2) Peraturan yang mengatur tentang Penataan PKL sudah terlalu lama sehingga perlu dikaji ulang;
- 3) Masih banyak PKL yang melanggar lokus (Lokasi Khusus) yang sudah ditetapkan di Perwali sehingga perlu adanya Pembinaan/Sosialisasi berkelanjutan terhadap para PKL tentang Regulasi/Peraturan yang berkaitan dengan PKL;
- 4) Masih banyak sarana prasarana pasar yang kurang layak sehingga perlu adanya pemeliharaan/pembaruan terhadap sarana prasarana yang ada di Pasar Rakyat;
- 5) Penataan pasar rakyat yang kurang bagus dan tidak nyaman bagi konsumen sehingga perlu adanya rehabilitasi/revitalisasi baik fisik maupun non fisik pasar;
- 6) Banyak bedak/kios di pasar yang tidak digunakan oleh pemilik hak pakai, terutama pada bedak/kios yang berada di lantai dua pasar; dan
- 7) Adanya kesenjangan keberadaan pasar sehingga diperlukan pembangunan pasar baru di Kecamatan Bugul Kidul.

Dari uraian isu di atas, tentunya akan mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung misi ke-1 dan misi ke-3. Program Prioritas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung misi ke-1 adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dipengaruhi oleh tinggi rendahnya produktivitas dan daya saing produk industri, dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan pasar. Untuk mencapai keberhasilan misi ke-1 maka perlu dilakukan berbagai jenis sosialisasi dan pelatihan bagi para pelaku IKM, serta melakukan revitalisasi

pada pasar dan melakukan pengawasan pengelolaan pasar secara rutin.

Program Prioritas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung misi ke-3 adalah Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang mana saat ini dipengaruhi oleh ketiadaannya sentra produksi kebutuhan bahan pokok. Sebagai tindak lanjut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus melakukan sosialisasi dan monitoring secara rutin kepada pedagang akan pentingnya informasi harga barang kebutuhan pokok yang mampu menekan inflasi sejak awal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Pada rancangan awal RKPD tahun 2025 terjadi beberapa perubahan pagu anggaran. Seperti pada urusan bidang perdagangan, beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan mengalami perubahan yang semula Rp.18.759.795.504,- menjadi Rp.92.773.438.085,- perubahan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan yang mendapat bantuan dana BK, sosialisasi perlindungan konsumen yang awalnya hanya berupa kegiatan sosialisasi, kini berkembang menjadi pengawasan pengemasan dan pelabelan barang beredar, sub kegiatan Peningkatan Citra Produk yang awalnya ditargetkan sebanyak 3 produk diubah menjadi 1 produk difokuskan pada kurasi dan pendampingan produk mebel.

Sedangkan pada urusan bidang perindustrian juga mengalami perubahan pagu anggaran yang awalnya Rp.1.344.797.800,- menjadi Rp.1.202.309.500,- perubahan ini

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

terjadi pada semua sub kegiatan, utamanya yang paling signifikan yaitu pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Perubahan ini disebabkan tambahan anggaran untuk kegiatan Dekranasda dan pengurangan anggaran terkait operasional UPT. Logam.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan kami sajikan pada Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Urusan Pemerintahan Pilihan				30.754.360.091	Urusan Pemerintahan Pilihan				104.558.216.372	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi	98%	10.649.766.787	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi	98%	10.582.468.787	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	98%	35.776.760	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	98%	35.776.760	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	20.419.080	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	20.419.080	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Pangungrejo, Pekuncen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.357.680	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Pangungrejo, Pekuncen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.357.680	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Pangungrejo, Pekuncen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Pangungrejo, Pekuncen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	98%	8.940.688.795	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	98%	8.940.688.795	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	8.899.936.595	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	8.899.936.595	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	40.752.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	40.752.200	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	98%	12.526.500	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	98%	12.526.500	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.526.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.526.500	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	98%	229.319.600	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	98%	229.316.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 Paket	3.557.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 Paket	3.557.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	45 Dokumen	2.829.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	2.829.600	
	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189.432.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189.432.800	
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	98%	174.406.000	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	98%	107.108.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	174.406.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	107.108.000	
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	936.528.132	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	936.528.132	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	20 Laporan	1.970.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	20 Laporan	1.970.000	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	127.657.832	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	124.078.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	806.900.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	649.444.800	
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi	98%	320.521.000	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi	98%	223.235.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	145.450.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	145.450.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	7.255.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	7.255.000	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	42.816.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	42.816.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.000.000	
2	Urusan Perdagangan				18.759.795.504	Urusan Perdagangan				92.773.438.085	
	Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar	100%	15.500.000.000	Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar	100%	90.031.484.481	
	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi	33,33%	11.725.000.000	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi	33,33%	86.256.484.481	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	10.000.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	84.531.484.481	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	1.725.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	1.725.000.000	
	Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Pelaku Pedagang yang Dibina	6,40%	3.775.000.000	Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Pelaku Pedagang yang Dibina	13,77%	3.775.000.000	
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	75.000.000	
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	3.700.000.000	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	3.700.000.000	
	Program : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	80%	113.326.600	Program : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	80%	350.000.000	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen	348 Peserta	113.326.600	Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen	120 Peserta	350.000.000	
	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	6 Laporan	113.326.600	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	2 Laporan	350.000.000	
	Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok	10%	674.552.400	Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok	10%	570.120.000	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10 %	10%	674.552.400	Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10%	10%	570.120.000	
	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	78.653.800	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	211.150.000	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	595.898.600	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	358.970.000	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program : Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor	5%	1.920.317.400	Program : Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor	5,0%	1.270.234.500	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase IKM yang Melakukan Ekspor	0,40%	1.920.317.400	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase IKM yang Melakukan Ekspor	0,40%	1.270.234.500	
	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional	Luar Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	35 Pelaku Usaha	1.793.964.500	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional	Luar Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	35 Pelaku Usaha	1.190.234.500	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Pasuruan	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	3 Produk	126.352.900	Sub Kegiatan : Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	2 Produk	80.000.000	
	Program : Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Presentase alat UTTP yang telah ditera dan Tera ulang	11,00%	551.599.104	Program : Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Presentase alat UTTP yang telah ditera dan Tera ulang	11,00%	551.599.104	
	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal	Dinas Perindustrian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang	1 Laporan	551.599.104	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal	Dinas Perindustrian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang	1 Laporan	551.599.104	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	dan Perdagangan				Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	dan Perdagangan				
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pasuruan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 Unit	538.337.604	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pasuruan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 Unit	538.337.604	
	Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	40 orang	13.261.500	Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	40 orang	13.261.500	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				1.344.797.800	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				1.202.309.500	
	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dalam dan Luar Kota	Persentase peningkatan IKM berkembang	5%	1.344.797.800	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dalam dan Luar Kota	Persentase peningkatan IKM berkembang	5%	1.202.309.500	
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Kota	Persentase IKM berkembang	30%	1.344.797.800	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Kota	Persentase IKM berkembang	30%	1.202.309.500	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6 Dokumen	300.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6 Dokumen	300.500.000	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	9 Dokumen	500.000.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	515.000.000	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	529.797.800	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	386.809.500	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dilakukan pula forum perangkat daerah yang mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan rencana kerja. Usulan ini dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang kelurahan dilanjutkan musrenbang kecamatan dan terakhir musrenbang kota. Dengan adanya musrenbang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat serta menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya hasil musrenbang kota akan dievaluasi dan disesuaikan dengan program/kegiatan PD yang bersangkutan.

Pada Rencana Kerja Tahun 2025, terdapat usulan dari masyarakat dalam bentuk pelatihan makanan olahan. Setelah dilakukan analisis dan sinkronisasi dengan program/kegiatan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan, usulan kegiatan dari masyarakat tersebut dapat diakomodir melalui sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dalam Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dari Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Berikut usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang disajikan pada Tabel T-C.32.

Tabel T-C.32
Usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1			2	3	4	5	6
BIDANG INDUSTRI							
1	Pelatihan Makanan Olahan	Musrenbang, Pokir, Forum PD	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Luar Kota	Persentase peningkatan IKM berkembang	5%	
			Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase IKM yang berkembang	30%	
			Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	
			1. Pelatihan Makanan Olahan	Luar Kota	Jumlah IKM yang dilatih	30 IKM	

Sumber : Hasil Musrenbangkel (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan)

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan nasional diawali dengan penciptaan kondisi dasar yang menjadi pondasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah RKP 2025 adalah RKP tahun pertama dalam konteks rencana pembangunan lima tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. RKP 2025 bertema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 3 Prioritas Pembangunan.

- 1) Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- 2) Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
- 3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

2. Kementerian Perdagangan

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-Undang 7 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan meningkatkan ekspor produk non migas dan ekspor jasa bernilai tambah lebih tinggi dan lebih kompetitif di pasar internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi;
- 2) Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur; dan
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas yang meliputi jasa pendorong ekspor non migas (jasa transportasi, jasa pariwisata dan jasa konstruksi).

3. Kementerian Perindustrian

Visi pembangunan industri nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan Industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
- 2) Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
- 3) Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
- 4) Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
- 6) Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur 2025

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, tema pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur ini selaras dengan arah pembangunan RPD tahun 2021-2026 dan masih bersifat sementara, menunggu tema perencanaan pembangunan RKP dari pusat untuk dilakukan penyelarasan lebih lanjut. RPD tersebut merupakan dokumen perencanaan transisi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur pada Tahun 2025-2026 yang harus disusun dikarenakan RPJMD Provinsi Jawa Timur berakhir pada Tahun 2024.

Adapun Tema Pembangunan Jawa Timur pada 2025 adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Terdapat sembilan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, antara lain:

- 1) Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
- 2) Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
- 3) Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan;
- 4) Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan;
- 5) Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;

- 6) Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, berbasis kerakyatan;
- 7) Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa;
- 8) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi;
- 9) Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

5. Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025

Mengacu pada RPJMD 2021-2026, Kota Pasuruan mengusung tema “Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial.” Dari tema tersebut, dilakukan upaya untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025, yang diturunkan menjadi 6 (enam) prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025, antara lain:

- 1) Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif;
- 2) Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder;
- 3) Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat;
- 4) Penguatan infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup;
- 5) Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli; dan
- 6) Sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung beberapa prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025, prioritas 3 dan 4 yaitu menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat dan penguatan infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

Dari serangkaian kebijakan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2025, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025,

dilakukan upaya untuk memastikan keselarasan kebijakan atau linearitas arah pembangunan Kota Pasuruan telah mendukung arah pembangunan RKP Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota “MADINAH” di perlukan sebuah pandangan jauh kedepan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah yang tepat sasaran. Dengan Visi, Misi dan Tujuan dan Strategi yang terdiri dari kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan harus menghasilkan karya yang konsisten dan eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif akan mempercepat perwujudan Kota Pasuruan sebagai Kota Perdagangan, Industri dan Jasa.

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen. Berdasarkan penjabaran tentang visi tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mendukung visi pembangunan Kota Pasuruan tahun 2021-2026, yakni:

“MENJADIKAN KOTA PASURUAN MAJU, INDAH, DAN HARMONIS” dalam arti :

“Maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya” atau dengan Slogan: Pasuruan Kota “MADINAH”.

Dengan visi tersebut diharapkan bisa menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam rangka ikut serta mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota “MADINAH”.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi

segenap komponen penyelenggara pemerintah tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai jembatan daripada visi di atas. Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan mengikuti misi ke-1 dan ke-3 Kota Pasuruan tahun 2021-2026 yaitu :

“Meningkatnya Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan” dan

“Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata”

Tujuan adalah apa yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam rangka kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada persyaratan visi dan misi serta didasarkan kepada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan tersebut adalah:

Kontribusi sektor unggulan meningkat

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dengan rincian strategis. Atas dasar itu, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produksi sektor unggulan; dan
- 2) Meningkatnya penjualan produk sektor unggulan.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rancangan program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 terdiri atas 7 Program, 14 kegiatan, dan 33 sub kegiatan dari program/kegiatan tersebut membutuhkan anggaran Rp.104.558.216.372,- yang dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) Sekretariat, dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretariat sebesar Rp 10.582.468.787,-
- Bidang Industri sebesar Rp 1.202.309.500,-
- Bidang Perdagangan sebesar Rp 2.741.953.604,-
- Bidang Pengelolaan Pasar sebesar Rp 90.031.484.481,-

Realisasi program/kegiatan dari pengajuan anggaran di atas mungkin ada yang belum dapat terlaksana pada tahun anggaran yang direncanakan, yang menjadi pertimbangan terhadap realisasi anggaran berupa rasionalisasi anggaran berdasarkan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan.

Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung dua Prioritas Pembangunan Walikota Tahun 2025 yaitu menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat dan penguatan infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

Apabila tidak terlaksana pada tahun yang direncanakan, maka diperlukan penataan kembali rencana program/kegiatan agar dapat terealisasi. Penempatan dan perencanaan tahun berikutnya merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan sesuai dengan kebijakan.

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan merupakan program prioritas RPJMD 2021–2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program yang tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja baik Program/Kegiatan/Sub kegiatan dipergunakan sebagai data dan informasi untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merancang anggaran, dan memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan. Kemudian, nantinya akan dijadikan bahan pengendalian dan evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan ditunjukkan oleh Tabel T-C.33 sebagai berikut:

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
3					104.558.216.372			937.437.655.192				
3	30				103.355.906.872			935.815.655.192				
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	98%	10.582.468.787	DAU		10.777.862.192
3	30	01	2.01		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	98%	35.776.760	DAU		35.776.760
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	4 Dokumen	20.419.080	DAU	Renja 2026, Renja Perubahan 2025, DPA, RKA, Musrenbang	20.419.080
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	10.357.680	DAU	LKJIP 2024, Monev Tribulan I, II, III, IV	10.357.680

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	1 Laporan	5.000.000	DAU	LHE SAKIP 2024		5.000.000
3	30	01	2.02		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	98%	8.940.688.795	DAU			9.068.784.200
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	68 Orang/bulan	8.899.936.595	DAU	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Tiap Bulan		9.000.000.000
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	40.752.200	DAU	Laporan Keuangan Tribulan I, II, III, IV		68.784.200
3	30	01	2.03		Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	98%	12.526.500	DAU			12.526.500
3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	12.526.500	DAU	Menyusun Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		12.526.500
3	30	01	2.06		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	98%	229.319.600	DAU			229.319.600
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Pasuruan	11 Paket	3.557.200	DAU	Menyediakan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.557.200

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	2.829.600	DAU	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2.829.600
3	30	01	2.06		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	10.000.000	DAU	Persiapan untuk Event Hari Jadi Kota Pasuruan dan Peringatan Hari Kemerdekaan		10.000.000
3	30	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 Laporan	23.500.000	DAU	Melakukan Pelaporan terhadap Fasilitasi Kunjungan Tamu		23.500.000
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	12 Laporan	189.432.800	DAU	Melakukan Pelaporan terhadap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		189.432.800
3	30	01	2.07		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan	98%	107.108.000	DAU			174.406.000
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	7 Unit	107.108.000	DAU			174.406.000
3	30	01	2.08		Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	98%	936.528.132	DAU			936.528.132
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Kota Pasuruan	20 Laporan	1.970.000	DAU	Membuat Laporan Penyediaan Surat Menyurat		1.970.000
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	12 Laporan	127.657.832	DAU	Membuat Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		127.657.832

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	12 Laporan	806.900.300	DAU	Membuat Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		806.900.300
3	30	01	2.09		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	98%	320.521.000	DAU			320.521.000
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pasuruan	14 Unit	145.450.000	DAU	Memelihara dan membayar pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		145.450.000
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pasuruan	23 Unit	7.255.000	DAU	Memelihara dan membayar pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		7.255.000
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	4 Unit	42.816.000	DAU	Memelihara Peralatan dan Mesin Lainnya		42.816.000
3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	1 Unit	125.000.000	DAU	Memelihara dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya (interior kantor)		125.000.000
3	30				Urusan Perdagangan				92.773.438.085				925.037.793.000
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80%	350.000.000	DAU			120.000.000

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	
3	30	02	2.06		Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	120 Peserta	350.000.000	DAU		120.000.000	
3	30	02	2.06	03	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Kota Pasuruan	2 Laporan	350.000.000	DAU	Pengawasan Pengemasan dan Pelabelan Barang Beredar	120.000.000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100%	90.031.484.481	DAU		921.357.793.000	
3	30	03	2.01		Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33,33%	86.256.484.481	DAU		917.557.793.000	
3	30	03	2.01	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	3 Unit	84.531.484.481	DAU, BK	Rehab/revitalisasi atap pasar Kebonagung, Rehab/revitalisasi paving drainase Pasar Gadingrejo, Pavingisasi halaman dan revitalisasi pagar Pasar Bukir, Rehab mushola,toilet Pasar Besar, Rehabilitasi Berat Pasar Besar	915.557.793.000	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
3	30	03	2.01	02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	6 Unit	1.725.000.000	DAU	Operasional Rutin Pasar yang Dikelola		2.000.000.000
3	30	03	2.02		Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaku Pedagang yang Dibina	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6,40%	3.775.000.000	DAU			3.800.000.000
3	30	03	2.02	01	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	3 Dokumen	75.000.000	DAU	Pembinaan Pedagang Kaki Lima Yang Dibina Pada Lokus Perwali		150.000.000
3	30	03	2.02	02	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	3.700.000.000	DAU	Honorarium Tenaga Harian Lepas, Outsourcing Jasa Keamanan Pasar		3.650.000.000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10%	570.120.000	DAU			680.000.000
3	30	04	2.02		Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10%	570.120.000	DAU			680.000.000
3	30	04	2.02	02	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Pasuruan	12 Laporan	211.150.000	DAU	Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok di 4 Pasar Tradisional		80.000.000

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
3	30	04	2.02	03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	3 Laporan	358.970.000	DAU	Pelaksanaan Pasar Murah		600.000.000
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5,0%	1.270.234.500	DAU			1.895.000.000
3	30	05	2.01		Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Melakukan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,40%	1.270.234.500	DAU			1.895.000.000
3	30	05	2.01	05	Sub Kegiatan : Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Kota Pasuruan	2 Produk	80.000.000	DAU			135.000.000
3	30	05	2.01	02	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Luar Kota	35 Pelaku Usaha	1.190.234.500	DAU			1.760.000.000
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase alat UTTP yang telah ditera dan Tera ulang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11,00%	551.599.104	DAU			985.000.000
3	30	06	2.01		Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Laporan	551.599.104	DAU			985.000.000

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	
3	30	06	2.01	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Pasuruan	1000 Unit	538.337.604	DAU	-Pelayanan Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Kota Pasuruan -Pembelian 1 unit kendaraan operasional	970.000.000	
3	30	06	2.01	02	Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Pasuruan	40 orang	13.261.500	DAU	Melakukan Pengawasan/ Penyuluhan ke Pemilik UTTP	15.000.000	
3	31				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN				1.202.309.500	DAU		1.622.000.000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM berkembang	Dalam dan Luar Kota	5%	1.202.309.500	DAU		1.622.000.000	
3	31	02	2.01		Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM berkembang	Dalam dan Luar Kota	30%	1.202.309.500	DAU		1.622.000.000	
3	31	02	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Pasuruan	6 Dokumen	300.500.000	DAU	Fasilitasi kegiatan Dekranasda Kota Pasuruan	350.000.000	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	
3	31	02	2.01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pasuruan	4 Dokumen	515.000.000	DAU	a. Pelatihan Makanan Minuman Olahan b. Penyusunan katalog produk logam c. Pembuatan sistem informasi database IKM berbasis website d. Bimtek Desain Kemasan dan Pelatihan Kemasan e. Pendampingan Sentra bagi Industri Kecil Menengah (IKM)		660.000.000
3	31	02	2.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	386.809.500	DAU	Operasional UPT. Logam		612.000.000

BAB V**PENUTUP**

Indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat bergantung pada komitmen dan peran serta aktif melalui profesionalisme aparatur pemerintahan, umpan balik pembangunan dari masyarakat, dan yang terakhir adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 merupakan rencana tahunan yang di dalamnya memuat kebijakan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ditetapkan untuk memberi arah dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 2021-2026 dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya koordinasi yang matang dan sinergi antar bidang dan sub bidang, baik dalam lingkup internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, maupun dengan lembaga perangkat daerah lain dalam upaya menekan sekecil mungkin hambatan dan kendala yang terjadi yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kinerja.

Melalui tersusunnya Renja 2025 ini diharapkan seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian

Rencana Kerja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

dan Perdagangan Kota Pasuruan dapat terlaksana dengan baik dan terarah sesuai rencana kerja.

Pasuruan, 22 Juli 2024

**Plt. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN**



HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19701223 199003 1 001